

**(STUDI TENTANG RADIO SUARA SURABAYA DALAM MENDORONG  
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
DEMOKRATISASI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI  
SURABAYA)**

**SKRIPSI**

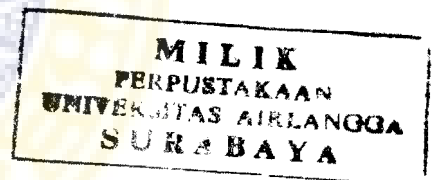


ky  
Fu. P. 04/05  
Sad  
P

**Disusun Oleh**

**HALIMATUS SA'DIYAH**

**NIM. 070016264**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
SEMESTER GASAL TAHUN 2004/2005**

**(STUDI TENTANG RADIO SUARA SURABAYA DALAM MENDORONG  
DEMOKRATISASI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI  
SURABAYA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Studi Pada Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik**



**Disusun Oleh**

**HALIMATUS SA'DIYAH**

**NIM. 070016264**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
SEMESTER GASAL TAHUN 2004/2005**

# HALAMAN PERSETUJUAN

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Skripsi ini setuju untuk diujikan

Surabaya, 29 September 2004

Dosen Pembimbing



Drs. Priyatmoko, MA

NIP. 130 937 952

# LEMBAR PENGESAHAN

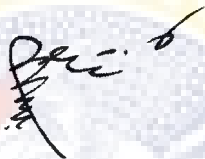
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Skripsi ini telah dipertahankan  
dihadapan panitia penguji pada hari

Rabu, 29 September 2004

Panitia penguji terdiri dari

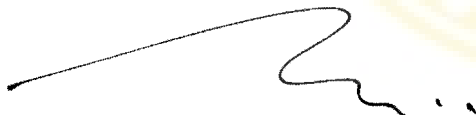
Ketua,



Drs. Haryadi, Msi

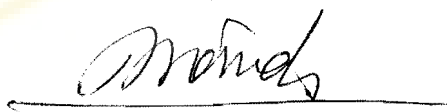
NIP. 131 653 466

Anggota,



Dra. Siti Aminah, MA

NIP. 131 836 624



Drs. Priyatmoko, MA

NIP. 130 937 952

## ABSTRAK

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Radio di era reformasi dan Otonomi Daerah dituntut untuk peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bila tidak, maka radio tidak akan bisa eksis. Radio Suara Surabaya merupakan salah satu radio yang selalu berusaha mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terkait dengan kehidupan sosial dan politiknya.

Seiring dengan berjalannya waktu dan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, Suara Surabaya berusaha memfasilitasi dan membentuk Program Dialog Otonomi Daerah sebagai wahana dialog bagi masyarakat dan pemerintah demi kelangsungan kota ke depan. Isu-isu seputar Otonomi Daerah diangkat untuk mengembangkan potensi pendengar. Melalui *talk show* yang mereka adakan, diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran hak dan partisipasi aktif.

Selain itu, radio Suara Surabaya lewat acara Dialog Otonomi Daerah ingin menjadi bagian dari fungsi kontrol. Fungsi kontrol Suara Surabaya terbagi pada dua pihak, yakni pihak pemerintah dan masyarakat. Fungsi kontrol ini tidak dilakukan dengan cara terbuka, vulgar atau melalui tindakan-tindakan. Tetapi diharapkan dengan Dialog Otonomi Daerah yang diadakan, masyarakat dan pemerintah mempunyai tempat untuk saling mengontrol, ada wadah untuk melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan.

Berdasarkan temuan data, diketahui bahwa dengan pertimbangan bisnis, radio Suara Surabaya tidak menjual produk tetapi menjual pendengar. Dalam hal kebijakan publik, pengaruh radio Suara Surabaya tidak bisa mempengaruhi secara langsung. Akan tetapi, radio Suara Surabaya berusaha berperan sebagai inspirator dan penengah.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa radio Suara Surabaya bias dalam melaksanakan demokratisasi karena lebih berorientasi pada bisnis. Segmentasi pendengar yang lebih menengah ke atas juga membuat Suara Surabaya tidak memberdayakan masyarakat secara utuh.

Namun radio Suara Surabaya tetap besar fungsinya sebagai *trigger-trigger* (pemacu) demokratisasi, gagasan, tempat orang bertukar pikiran dan bertemu secara virtual lewat udara. Bagaimanapun juga “Ruang Publik” ini tetap merupakan kerangka menarik untuk dijadikan landasan kerja terciptanya aktivitas media yang demokratis.

**Keyword:** ruang publik (*public sphere*), demokratisasi, otonomi daerah